



**SALINAN**

**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 69 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SURAT  
PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Besaran Uang Persediaan dan Batas Minimal Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2019.**

### **Pasal 1**

Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 2**

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019.

### **Pasal 3**

Pengisian kembali Uang Persediaan dapat dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) setelah uang persediaan sebelumnya dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 4**

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran.

### **Pasal 5**

Batas minimal pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) pada Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>	<b>Batas Minimal Pengajuan TU</b>
1.	Kecamatan	Rp. 2.500.000,00
2.	Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD / Inspektorat/Badan/Dinas	Rp. 5.000.000,00

**Pasal 6**

Terhitung paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai akhir Tahun Anggaran 2019, bendahara pengeluaran SKPD wajib menyeter kembali Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (UP dan TU) yang tidak dipergunakan ke Rekening Kas Umum Daerah.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 28 Desember 2018

**BUPATI SITUBONDO,**  
ttd

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**  
ttd

**SYAIFULLAH**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR**

**LAMPIRAN** Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

Nomor : \_\_\_\_\_ Tahun 2018

**BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>	<b>BESARAN UP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	200.000.000
2	Dinas Kesehatan	500.000.000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	500.000.000
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	200.000.000
5	Satuan Polisi Pamong Praja	50.000.000
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.000.000
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000
8	Dinas Sosial	50.000.000
9	Dinas Tenaga Kerja	50.000.000
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.000.000
11	Dinas Ketahanan Pangan	50.000.000
12	Dinas Lingkungan Hidup	100.000.000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.000.000
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	50.000.000
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50.000.000
16	Dinas Perhubungan	50.000.000
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	50.000.000
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	50.000.000
19	Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu	50.000.000
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.000.000
21	Dinas Perikanan	100.000.000
22	Dinas Pariwisata	100.000.000
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan	100.000.000
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	100.000.000
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	100.000.000
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50.000.000
28	Badan pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100.000.000
29	Inspektorat Daerah	50.000.000
30	Sekretariat Daerah	200.000.000
31	Sekretariat DPRD	100.000.000
32	Kecamatan Banyuglugur	50.000.000
33	Kecamatan Jatibanteng	50.000.000
34	Kecamatan Sumbermalang	50.000.000
35	Kecamatan Besuki	50.000.000
36	Kecamatan Suboh	50.000.000
37	Kecamatan Mlandingan	50.000.000
38	Kecamatan Bungatan	50.000.000
39	Kecamatan Kendit	50.000.000

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>	<b>BESARAN UP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
40	Kecamatan Panarukan	50.000.000
41	Kecamatan Situbondo	50.000.000
42	Kecamatan Panji	50.000.000
43	Kecamatan Mangaran	50.000.000
44	Kecamatan Kapongan	50.000.000
45	Kecamatan Arjasa	50.000.000
46	Kecamatan Asembagus	50.000.000
47	Kecamatan Jangkar	50.000.000
48	Kecamatan Banyuputih	50.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.200.000.000</b>

**BUPATI SITUBONDO,**

**DADANG WIGIARTO**